

Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia

Farahdinny Siswajanthi¹, Khadizah Aliyah Shiva², Nashwa Salsabila³, Salsabila Afifany Susanta Putry⁴, Silvia Maharani Iskandar Putri⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor

e-mail : farahdinny@unpak.ac.id¹, khadizahshiva02@gmail.com²,
nashwasalsabila93@gmail.com³, afifanysalsabila@gmail.com⁴,
silviamaharani0201@gmail.com⁵

Abstrak

Negara Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang konsisten secara positif di saat negara-negara maju mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus. Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya. Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrument untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimalkan kesejahteraan ekonomi. Fungsi kebijakan fiskal sebagai instrumen stabilisator dalam memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional secara nyata terus meningkat sesuai dengan penggunaan sumber daya atau faktor faktor produksi dan efektifitas kegiatan masyarakat dengan tidak mengabaikan redistribusi pendapatan atau kekayaan serta upaya peningkatan kesempatan kerja. Perubahan tingkat dan komposisi pajak serta pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel meliputi permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya dan distribusi pendapatan. Penelitian ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah secara agregat.

Kata Kunci : *Kebijakan Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Ekonomi Indonesia*

Abstract

Indonesia experienced consistent positive economic growth at a time when developed countries experienced negative economic growth. Indonesia has economic growth that increases every year. Fiscal policy is the government's steps to manage expenditure and taxation or the use of instruments to influence the workings of the economic system in order to maximize economic welfare. The function of fiscal policy is as a stabilizing instrument in maintaining economic stability so that national income continues to increase in real terms in accordance with the use of resources or production factors and the effectiveness of community activities without ignoring the redistribution of income or wealth as well as efforts to increase employment opportunities. Changes in the level and composition of taxes and government spending can influence variables including aggregate demand and the level of economic activity, patterns of resource distribution and income distribution. This research analyzes the influence of government spending in aggregate.

Keywords: *Fiscal Policy, Economic Growth, Indonesian Economy*

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal menjadi elemen utama dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat suatu perekonomian dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan ini dapat pula mempengaruhi sisi penawaran yang sifatnya lebih berjangka panjang, melalui

peningkatan kapasitas perekonomian. Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output berasal saat ke saat sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Kebijakan fiskal adalah cara pemerintah menyesuaikan taraf pengeluaran serta tarif pajaknya untuk memantau dan mempengaruhi perekonomian suatu negara. Ini ialah taktik dari kebijakan moneter di mana bank sentral mempengaruhi jumlah uang tersebar suatu negara.

Sistem kebijakan fiskal di Indonesia sudah mengalami perubahan dari masa orde lama, orde baru, hingga waktu ini. Sistem kebijakan fiskal yang berubah-ubah ini dimaksudkan untuk menjaga perekonomian agar tetap stabil dari gejolak ekonomi yang relatif besar. Kebijakan anggaran berimbang dan bergerak maju yang dilakukan di masa orde baru contohnya, kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hiper-inflasi.

Pengaruh kebijakan fiskal yang signifikan terhadap perekonomian dikemukakan oleh Keynes. Keynes menekankan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah tidak hanya memindahkan sumber daya asal sektor partikelir ke pemerintah. Selain itu, Keynes juga mengemukakan adanya akibat berganda (multiplier effect) dari pengeluaran tersebut.

Kesimpulan tersebut pula diperkuat oleh riset di Bank Indonesia (2009) bahwa kebijakan fiskal Indonesia cenderung bersifat asiklikal secara agregat atau justru prosiklikal bila sesuai pengelompokan pengeluaran. Sifat siklikalitas yang demikian berpotensi menyampaikan tekanan instabilitas pada perekonomian, seperti kenaikan inflasi. Plotting antara rasio pengeluaran pemerintah, dengan tidak memasukkan pembayaran bunga, menggunakan pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya Siklikalitas Kebijakan Fiskal di Indonesia.

Pada Indonesia sektor pemerintah memiliki peranan besar dalam sejarah perekonomian. Peran tersebut dituangkan pemerintah pada bentuk pelaksanaan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan utama pembangunan berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi pengangguran dan mengendalikan inflasi. Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah Indonesia memiliki dua instrumen utama yaitu perpajakan dan pengeluaran. Pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrumen penting kebijakan fiskal diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengoptimalkan peran tersebut dengan menaikkan pengeluaran (share) terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Peran pemerintah dalam perekonomian ditunjukkan oleh pengeluaran untuk bidang ekonomi pada persentase berasal total pengeluaran cenderung meningkat.

Tahun 2020 adanya pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia dan Indonesia pun terkena imbas dari covid 19 tersebut. Di tengah gejolak pasar keuangan dunia, pasar saham Indonesia termasuk sebagai salah satu pinnacle performer di dunia pada tahun 2022. Berbagai application perlindungan sosial, khususnya pada keluarga miskin dan rentan miskin, juga selalu menjadi prioritas penting dalam APBN. WHO telah mengumumkan berakhirnya status covid 19. Perkembangan dinamika internasional yang sedemikian cepat pascapandemi covid 19, menciptakan kompleksitas yang berat dalam beberapa tahun ke depan. Ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian internasional ke depan. Pertama ketegangan geopolitik, kedua cepatnya perkembangan teknologi virtual, ketiga perubahan iklim serta respons kebijakan yang mengikutinya, keempat covid 19 telah menjadi bukti bahwa munculnya sebuah pandemi tidak bisa terelakkan.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Menurut Wolfson sebagaimana dikutip Suparmoko, kebijakan fiskal (fiscal policy) ialah tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan serta pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumberdaya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan. Sedangkan Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis, dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah. dari dua definisi di atas dapat ditarik benang merah, bahwa kebijakan fiskal ialah kebijakan pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Penarikan kesimpulan ini bertujuan agar definisi kebijakan fiskal mengandung makna umum, artinya ia adalah suatu gambaran yang mampu terjadi pada berbagai sistem ekonomi.

Reksoprayitno mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai tahap yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan dampak perekonomian terhadap APBN. Beban penerimaan dan pengeluaran pajak dalam bentuk pembangunan merupakan APBN. Kebijakan fiskal yakni strategi saat digunakan untuk mengatur dan mempengaruhi tingkat permintaan agregat perekonomian. Kebijakan fiskal terbagi menjadi dua yaitu pasif dan aktif. Kebijakan pemerintah yang dikenal sebagai kebijakan fiskal aktif melibatkan penyesuaian rencana pengeluaran atau tarif pajak. Apa pun yang menurunkan kecenderungan pengeluaran marjinal dibandingkan dengan pendapatan nasional dianggap sebagai kebijakan fiskal pasif. Dengan itu, kebijakan adalah segala sesuatu yang mempunyai kecenderungan untuk menaikkan defisit publik atau menurunkan defisit publik dengan tidak memerlukan tindakan tegas dari pembuat kebijakan.

Pembahasan

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan dan anggaran belanja negara. Pajak ini dipergunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang ditimbulkan oleh aktivitas pemerintahan. Kebijakan fiskal merupakan bagian berasal kebijakan ekonomi makro yang dipergunakan untuk mencapai target pembangunan. Fungsi kebijakan fiskal secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu fungsi penetapan target aturan, fungsi distribusi pendapatan serta subsidi, dan fungsi stabilisasi ekonomi. Fungsi alokasi aturan bertujuan untuk tujuan pembangunan ekonomi. Fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dimaksudkan untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa aturan pemerintah menjadi indera untuk memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Pemerintah membentuk kebijakan fiskal untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran serta pendapatan berbentuk pajak pemerintah. Kebijakan fiskal tidak sama dengan kebijakan moneter, yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat suku bunga serta jumlah uang tersebar. Instrumen utama kebijakan fiskal ialah pengeluaran serta pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak serta pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel mencakup permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya dan distribusi pendapatan.

Pemerintah yang menjalankan kebijakan fiskal merupakan menggunakan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian atau dengan perkataan lain, memakai kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. dengan melalui kebijakan fiskal, diantaranya pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional.

Kebijakan fiskal dicetuskan oleh seorang ekonom asal Inggris, John Maynard Keynes di bukunya yang berjudul *The General Theory of Employment* pada 1936. Teori Keynes/Keynesian sebagai reaksi Keynes atas depresi besar yang melanda perekonomian Amerika sekitar tahun 1930-an dan kritiknya terhadap teori klasik. Teori klasik menyatakan bahwa belanja pemerintah dapat menyebabkan turunnya belanja swasta karena karena teori ini percaya dengan kondisi full employment. Sedangkan teori Keynesian berpendapat bahwa untuk mencapai perekonomian yang baik, perlu adanya campur tangan pemerintah. Hal tersebutlah yang menjadikan cikal bakal kebijakan fiskal.

Kebijakan Fiskal Terkini di Indonesia

Dokumen KEM-PPKF Tahun 2024 merupakan bagian dari proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi selama dua periode pemerintahan, dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Di tengah berbagai guncangan besar yang melanda perekonomian dunia, Pemerintah beserta-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan segenap lapisan masyarakat berhasil menjaga kinerja ekonomi permanen solid, mampu pulih lebih cepat dan bangkit lebih bertenaga pada masa pandemi, dan terus konsisten melaksanakan berbagai agenda reformasi struktural. Pada satu dasa warsa terakhir, kita menyaksikan bersama tantangan eksternal yang begitu besar.

Hal ini ditandai dengan menurunnya kinerja ekonomi global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dalam satu dekade terakhir (2013 - 2022) hanya 3,1 persen, lebih rendah dari dekade sebelumnya (2003 - 2012) yg mencapai 4,2 persen. Tiongkok, yang pada dekade Penyebab perlambatan ini terutama ialah menguatnya perang dagang antara Amerika perkumpulan (Alaihi Salam) dan Tiongkok, periode pengetatan kembali kebijakan moneter pada Alaihi Salam pasca dunia Financial Crisis (GFC) – yang kita kenal sebagai taper tantrum, pandemi Covid-19, perang di Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga komoditas serta melonjaknya inflasi dunia, dan dampak perubahan iklim yang makin seringkali terjadi.

Namun, kita bersyukur pada tengah guncangan-guncangan akbar gejala perekonomian global, ketahanan perekonomian Indonesia permanen terjaga. Kolaborasi yang sangat baik serta dukungan dari seluruh pihak, termasuk DPR, otoritas lain, dan seluruh komponen bangsa di pelaksanaan banyak sekali program pembangunan telah memberikan hasil yang nyata bagi perekonomian. Pada satu dekade sebelum pandemi Covid-19, Indonesia menjadi satu berasal sedikit negara G20 yang bisa tumbuh pada atas rata-rata pertumbuhan dunia, beserta Tiongkok dan India. Rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2010 sampai dengan 2019, sebelum pandemi menghantam dunia, sebesar 5,4 persen, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,7 persen, juga jika dibandingkan dengan emerging economies anggota G20 lainnya yang tumbuh rata-rata sebesar 3,7 persen. Investasi dan usaha yang terus dilakukan, Pemerintah mampu mendorong aktivitas ekonomi nasional pada tengah perlambatan ekonomi dunia.

Pandemi Covid-19 berawal dari beberapa kasus yang diduga penyakit pneumonia di Wuhan, China pada Desember 2019 (Arnani, 2020). Setelah dilakukan identifikasi lebih lanjut, ditemukan bahwa penyebabnya adalah jenis virus corona baru yang diberi nama severe Acute Respiration Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV2 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Penyakit yang ditimbulkan dari virus ini kemudian diberi nama Coronavirus Disease-2019 atau COVID-19. Penyakit yang diperkirakan berasal dari kelelawar (Readfearn, 2020; Susilo et al., 2020) ini memiliki gejala umum berupa demam, batuk kering, dan kelelahan (WHO, 2020b). Selanjutnya, pada 11 Maret 2020, Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) untuk meningkatkan kewaspadaan pemerintah dan masyarakat karena penyebarannya sangat cepat dan luas (Elvina, 2020; Dong et al., 2020 dalam Yamali & Putri, 2020). Alasan ini juga dikemukakan oleh (Susilo et al., 2020) yang menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 harus diwaspadai karena penularannya relatif cepat, memiliki tingkat kematian yang tidak dapat diabaikan, dan belum adanya pengobatan berupa terapi definitif. Berdasarkan Arifin (2020) dan Ihsanuddin (2020), penetapan status Covid-19 juga dilakukan Indonesia pada 13 April

2020. Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Presiden Joko Widodo resmi menetapkan bencana penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

Terlihat bahwa PDB Indonesia pada kuartal I 2020 mengalami penurunan sebesar 2% walaupun belum menyentuh angka negatif. Namun, pada kuartal selanjutnya, PDB Indonesia mengalami penurunan drastis sebesar 8,29% sehingga tercatat di angka -5,32%. Sedangkan, pada kuartal III 2020, mengalami kenaikan sebesar 1,83% sehingga tercatat di angka -3,49%. Melalui data tersebut, terlihat bahwa Indonesia mengalami resesi pada kuartal III karena dalam dua kuartal berturut-turut, PDB Indonesia tercatat dengan angka negatif. Resesi dapat menyebabkan penurunan semua aktivitas ekonomi seperti keuntungan perusahaan atau organisasi baik besar maupun kecil (UMKM), lapangan pekerjaan, dan investasi secara bersamaan (Blandina et al., 2020). Pernyataan ini didukung oleh beberapa fakta di lapangan yang dipaparkan dalam (Yamali & Putri, 2020), seperti terjadinya PHK besar-besaran, penurunan impor, inflasi, dan kerugian di perusahaan penerbangan dan perhotelan (Muda, 2020; Yamali & Putri, 2020). Selain itu, adanya Pembatasan (PSBB) untuk menekan penyebaran Covid-19 juga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat

1. Fokus Kebijakan Jangka Pendek

Strategi kebijakan jangka pendek penekanan untuk mengatasi berbagai tantangan serta memperkuat fondasi agar transformasi ekonomi dapat berjalan optimal. Hal itu difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.

a. Fokus pertama, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2024.

Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menargetkan pada tahun 2024 tidak ada lagi keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran berada di bawah USD1,9 PPP (Purchasing Power Parity) per hari atau sekitar Rp322.170 per kapita per bulan (World Bank, 2022). Dalam delapan tahun terakhir, kondisi kemiskinan ekstrem telah mengalami perbaikan. Pada tahun 2014-2022, penurunan kemiskinan ekstrem rata-rata sebesar 12,64%.

b. Fokus kedua, mengakselerasi penurunan prevalensi stunting menuju 14 persen pada tahun 2024.

Tren prevalensi stunting di Indonesia terus mengalami penurunan dalam sepuluh tahun terakhir, namun untuk mengakselerasi pencapaian target 14 persen tidak bisa dengan business as usual, maka dibutuhkan terobosan kebijakan. Selama ini, beberapa faktor yang kuat sebagai pemicu stunting antara lain keterbatasan fasilitas kesehatan seperti, posyandu dan rumah sakit bersalin, masih terbatasnya kualitas makanan dan air bersih, dan masih terbatasnya pangan sehat untuk ibu dan anak, (antara lain susu, daging, buah, telur, dan MPASI).

c. Fokus ketiga, Pemerintah terus berupaya mengendalikan inflasi dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Kenaikan harga komoditas bersumber dari eskalasi konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan terjadinya disrupsi perdagangan internasional, di tengah perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih. Hal ini mendorong tekanan inflasi semakin persisten dan diikuti dengan pengetatan moneter yang semakin agresif. Meskipun demikian, di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan pertumbuhan tersebut, kinerja ekonomi Indonesia menunjukkan hasil yang sangat baik. Indonesia sebagai salah satu negara yang paling resilien pada tahun 2022 menggunakan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,3 persen (yoy). Selain itu, tekanan inflasi global yang sangat tinggi juga tak sepenuhnya ditransmisikan di perekonomian domestik.

Salah satu peran APBN untuk pengendalian inflasi tercermin dalam kebijakan subsidi dan kompensasi energi serta penyesuaian harga BBM. Secara umum, subsidi dan juga kompensasi energi dialokasikan guna untuk meredam fluktuasi harga minyak dunia yang terjadi. Kenaikan harga minyak dunia mengakibatkan inflasi administered price mengalami tekanan yang cukup signifikan pada tahun 2014 dan 2022.

d. Fokus keempat, mendorong peningkatan investasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.

Investasi penanaman modal di Indonesia tahun 2015-2019 menunjukkan pertumbuhan positif, terutama didorong oleh sektor energi dan pertambangan. Kebijakan fiskal dalam rangka mendorong peningkatan investasi tahun 2024 diarahkan antara lain: (i) melanjutkan kebijakan insentif perpajakan; (ii) perbaikan kemudahan dan kepastian usaha dengan memperhatikan pembukaan lapangan kerja dan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI); (iii) percepatan pembangunan infrastruktur yang mendorong investasi; dan (iv) peningkatan SDM yang berkualitas. Kebijakan insentif perpajakan, khususnya pajak penghasilan meliputi tax holiday, maupun tax allowance, dan super deduction, serta jenis pajak lainnya sepanjang badan usaha atau wajib pajak yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pada sisi perbaikan dan kepastian usaha, penguatan implementasi UU HPP dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

2. Arah Kebijakan Fiskal Jangka Menengah

Arah kebijakan jangka menengah difokuskan untuk mendukung penguatan kualitas SDM (human capital), akselerasi pembangunan infrastruktur (physical capital), mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (natural capital), dan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (institutional reform), serta mendorong ekonomi hijau (green economy).

a. Fokus pertama, Pemerintah konsisten mendorong peningkatan kualitas SDM (human capital).

Secara umum, kualitas SDM Indonesia masih perlu terus ditingkatkan agar dapat berdaya saing secara lebih optimal di tingkat global. Adapun beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan di bidang pendidikan antara lain: 1.HCI Indonesia yang relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN 2.Skor PISA Indonesia yang belum meningkat signifikan 3.RLS penduduk Indonesia yang lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN 4.Tingkat pengangguran lulusan pendidikan vokasi yang cukup tinggi 5.Tingkat partisipasi PAUD dan Perguruan Tinggi yang relatif rendah.

Pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% APBN untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan sejak tahun 2009 sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Dalam periode 2019 –2023, secara nominal anggaran pendidikan meningkat dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 5,8 persen per tahun. Anggaran pendidikan di tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp612,2 triliun atau meningkat sebesar 27,4 persen dari realisasi tahun 2022. Anggaran pendidikan tersebut dialokasikan melalui BPP, TKD, dan pembiayaan dengan porsi terbesar dialokasikan dalam TKD yang mencapai 49,9 persen dari total anggaran Pendidikan.

Pemerintah terus berupaya untuk memberikan layanan kesehatan berkualitas bagi rakyat Indonesia yang mencakup seluruh tahapan kehidupan manusia. Hal ini dilaksanakan antara lain melalui penguatan program JKN untuk meningkatkan akses 72 seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan baik preventif maupun kuratif. Selain itu, Pemerintah juga memperkuat program pelayanan untuk kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan deteksi dini penyakit, serta peningkatan layanan kesehatan bagi lansia.

b. Fokus kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi dan daya saing.

Selama beberapa tahun terakhir, anggaran infrastruktur mengalami peningkatan. Dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur, Pemerintah telah mengeluarkan anggaran rata-rata sebesar Rp374,2 triliun per tahun dalam periode tahun 2019-2023. Untuk meningkatkan konektivitas, Pemerintah telah membangun infrastruktur jalan baik jalan tol, jalan nasional dan jalan daerah secara masif. Pada periode 2014 sampai dengan 2021, Pemerintah telah membangun Jalan (Jalan Nasional dan Jalan Daerah) sepanjang 425 ribu kilometer serta lebih dari 1.700 kilometer Jalan Tol. Saat ini juga rasio elektrifikasi masih

berkisar 99,6% dan untuk mencapai rasio elektrifikasi 100%, Pemerintah berupaya membangun jumlah pembangkit listrik dan juga kapasitas aliran listrik. Pada periode 2014 sampai dengan 2021, Pemerintah berhasil meningkatkan kapasitas aliran listrik sebesar 21,47 GW.

Kebijakan fiskal untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur tahun 2024 difokuskan pada beberapa hal. Fokus kebijakan tersebut antara lain: i. Melanjutkan infrastruktur pendukung kemudahan berusaha dan transformasi ekonomi seperti: infrastruktur TIK, energi, konektivitas, dan pangan. ii. Meningkatkan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi.iii. Membangun infrastruktur yang berorientasi hijau sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim iv. Penguatan infrastruktur pendukung hilirisasi SDA. Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur masih menghadapi beberapa tantangan antara lain kurangnya harmonisasi kebijakan atau regulasi antara Pemerintah dan pemda, pendanaan yang cukup besar serta sumber daya di dalam negeri yang terbatas.

c. Fokus ketiga, Pemerintah berkomitmen untuk mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi.

Hilirisasi SDA menjadi salah satu strategi dalam menciptakan aktivitas ekonomi yang bernilai tinggi. Pemerintah telah memberikan insentif fiskal untuk mendukung hilirisasi SDA, antara lain:

1. Pembebasan bea masuk impor peralatan, pembebasan pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk mesin dan barang strategis lainnya, tarif PPnBM nol persen, larangan ekspor bahan mentah, dan bea keluar bahan mentah/baku untuk mendukung ketersediaan/kecukupan bahan baku dan peralatan
2. Pengembangan kawasan khusus, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Berikat, Gudang Berikat, dan belanja K/L untuk mendukung penyediaan infrastruktur dan pemberian fasilitas perpajakan.
3. Penjaminan Pemerintah (government guarantee), Viability Gap Fund (VGF), dan Project Development Facility (PDF) dalam rangka mendukung skema KPBU
4. Tax Holiday dan Tax Allowance, fasilitas perpajakan, royalti nol persen peningkatan nilai tambah batu bara, pembedaan tarif royalti komoditas mineral, fasilitas ekspor oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan perjanjian perdagangan Free Trade Agreement (FTA) dalam rangka mendorong investasi dan perluasan akses pasar, dan
5. Superdeduction PPh penelitian dan pengembangan dan vokasi, pemanfaatan Dana Abadi Penelitian, alokasi dana riset melalui K/L, serta alokasi anggaran Pendidikan untuk pengembangan Sumber Daya Alam yang sejalan kebutuhan industri dalam rangka mendorong riset dan Sumber Daya Alam unggul.

d. Fokus keempat, mendorong penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (institutional reform).

Komitmen Indonesia dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2010 melalui penetapan Perpres eighty one/2010. Perpres tersebut tentang Grand layout Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi dalam tiga fase, yaitu fase pertama tahun 2010-2014, fase kedua tahun 2015- 2019, dan fase ketiga tahun 2020-2025. Pada akhir tahun 2025, reformasi birokrasi diharapkan dapat menghasilkan governance yang berkualitas sehingga mampu menghasilkan improvement consequences yang ditandai dengan:

- 1) Tidak adanya korupsi;
- 2) Pengelolaan APBN/APBD yang efektif dan efisien;
- 3) Proses perizinan yang cepat dan tepat;
- 4) Komunikasi publik yang baik;
- 5) Penggunaan jam kerja yang efektif dan produktif;
- 6) Mekanisme reward dan punishment yang terimplementasi secara konsisten, berkelanjutan, serta memberikan hasil pembangunan yang nyata. schedule reformasi birokrasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi merupakan dua dari lima arahan strategis Presiden dalam mencapai Visi Indonesia Maju 2045.

Melalui reformasi birokrasi, diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang bergerak lebih lincah dan mampu secara cepat beradaptasi dengan teknologi pada generation persaingan antarnegara yang semakin sengit.

e. Fokus kelima, mendorong pengembangan ekonomi hijau (inexperienced economic system).

Reformasi struktural dan kebijakan fiskal diharapkan mampu menopang pembangunan ekonomi sekaligus memitigasi dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan. Arah perkembangan ekonomi baru ini tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif secara sosial, namun juga wajib memitigasi dampak-dampak pembangunan terhadap keberlanjutan lingkungan. Salah satu tantangan terbesar adalah Emisi gas rumah kaca (GRK) yang dapat memicu naiknya suhu bumi dan bencana alam. Berbagai komitmen, kerja sama, dan perjanjian internasional telah disepakati sebagai upaya kolektif untuk menurunkan emisi GRK. Oleh karena itu, sebagian besar kebijakan ekonomi hijau diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjamin keberlangsungan pembangunan generasi yang akan datang.

Analisis Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa perubahan kebijakan fiskal dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian oleh Suryono dan Rusmin (2019) menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, penelitian oleh Arfianto dan Siregar (2019) menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang kurang tepat dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh Hapsari dan Anwar (2019) menunjukkan bahwa penurunan subsidi BBM dan listrik yang tiba-tiba oleh pemerintah pada tahun 2014 berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Efektivitas kebijakan dalam penelitian Siregar, H. (2017) Melalui penelitian Evaluasi Efektivitas Kebijakan Fiskal di Indonesia dalam Studi ini mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal di Indonesia dengan menggunakan data dari periode 2000-2015. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pengaruhnya terhadap konsumsi pemerintah dan investasi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam implementasi kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi efektivitasnya.

Menurut Iskandar, D., & Husodo, Z. (2020) The Effectiveness of fiscal policy in Indonesia. Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) untuk menganalisis efektivitas kebijakan fiskal di Indonesia. Dari Penelitian dijelaskan bahwa kebijakan fiskal memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1. Pajak Ekspor Migas: Indonesia memberlakukan pajak ekspor migas sebagai sumber pendapatan Negara
2. Kontrak Kerja Sama (KKS): Pemerintah Indonesia menandatangani kontrak kerja sama dengan perusahaan migas yang melibatkan pembagian produksi dan keuntungan dari ekspor migas.
3. Dana Cadangan Migas: Pemerintah Indonesia telah membentuk Dana Cadangan Migas (DCM) yang bertujuan untuk mengelola pendapatan negara dari sektor migas
4. Pengendalian Impor Barang Konsumsi: Kebijakan untuk mengendalikan impor barang konsumsi yang dapat diproduksi secara lokal, guna mendorong pertumbuhan industri dalam negeri
5. Tarif Bea Masuk: Kebijakan penetapan tarif bea masuk terhadap barang impor untuk melindungi industri dalam negeri dan mendorong pertumbuhan sektor produksi dalam negeri

6. Sertifikasi Impor: Kebijakan pemberlakuan sertifikasi impor untuk memastikan kualitas dan keamanan barang impor yang masuk ke Indonesia.

SIMPULAN

Dalam melakukan analisis akibat kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal mempunyai peran yang signifikan dalam membentuk dinamika ekonomi negara. Beberapa temuan utama mencakup Keterkaitan yang Erat yaitu terdapat keterkaitan erat antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi pada Indonesia. Implementasi kebijakan fiskal yang bijak dapat memberikan kontribusi positif terhadap penguatan ekonomi. Pentingnya Pengelolaan aturan yaitu Pengelolaan anggaran yang efektif serta efisien sangat penting untuk memastikan bahwa setiap dana yang dihabiskan oleh pemerintah memberikan dampak aporisma pada pertumbuhan ekonomi. peran Sektor-Sektor Kunci: Sektor-sektor kunci, seperti infrastruktur dan industri manufaktur, memiliki peran penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. oleh karena itu, perlu adanya perhatian spesifik pada sektor-sektor ini dalam perumusan kebijakan.

Tantangan dan Peluang yaitu terdapat tantangan dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global, tetapi terdapat pula peluang untuk meningkatkan daya saing serta keberlanjutan ekonomi, melalui reformasi kebijakan menggunakan pemahaman ini, rekomendasi kebijakan dapat membantu membentuk lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta inklusif di Indonesia. Langkah langkah lanjutan dan kerja sama lintas sektor diharapkan dapat memperkuat dampak positif kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada masa depan Optimalkan Penyusunan aturan: Sarankan pemerintah untuk mengoptimalkan penyusunan aturan fiskal menggunakan fokus pada sektor-sektor yang memiliki akibat tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Efisiensi Pengeluaran Publik: Usulkan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran publik, termasuk pemantauan yang lebih ketat terhadap proyek-proyek infrastruktur program.

Pengembangan sumber Pendapatan: Anjurkan diversifikasi sumber pendapatan negara untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yaitu Sarankan pemberdayaan masyarakat melalui acara-acara pelatihan dan pendidikan, sehingga pertumbuhan ekonomi lebih merata dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. kolaborasi Pihak swasta: Dorong kerjasama antara pemerintah dan sektor partikelir untuk mempercepat implementasi proyek-proyek strategis yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti, Kota Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Yogyakarta " PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA: Determinan dan Prospeknya " April 2008: 44 - 55 hlm 45 – 46
- Badan Kebijakan Fiskal, "KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2024", (2023)
- Digdowiseiso, Kumba, Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Makro, Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional. hlm. 125.
- Eri Nurhayana , Desember 2023 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta "Daryono Soebagiyo Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2008-2022" 107
- M. Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, Yogyakarta, Kota Yogyakarta ,BPFE-Yogyakarta, 199
- Noor Faizah, Rabu, 13 Des 2023 07:30 WIB, Kebijakan Fiskal, Jakarta, DetikEdu
- Noor, M. H. (2016). DJKN Sebagai Defender Fiskal. Djkn.Kemenkeu.Co.Id)
- Priyono dan Teddy Chandra (2016). Esensi Teori Ekonomi Makro, Sidoarjo: Zlfatama Publishing. hlm. 17

Rudi Alamsyah, Sri Danti Maulida Sari. 15 Juli 2023, Analisis Perubahan Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Universitas Nusa Putra Sukabumi,
Samuelson dan William D. Nordhaus, Makroekonomi: Edisi Keempatbelas, terj. Haris Munandar (Jakarta; Penerbit Erlangga, , 1997), h. 346
Swasito. (2020). Ekonomi Makro: Pandangan Teori Ekonomi Klasik vs Keynesian (Bagian 1) –Kemenkeu Learning Center. Klc.Kemenkeu.Go.Id
Yani Magdalena Sirait, 2013 Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Kota Jember
“ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA”
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_fiskal